

BAB II

KAJIAN TEORI, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Teori

2.1.1 Teori Produksi

Menurut Sugiarto dkk (2007), produksi adalah suatu kegiatan yang mengubah input menjadi output. Kegiatan tersebut dalam ekonomi biasa dinyatakan dalam fungsi produksi. Fungsi produksi menunjukkan jumlah maksimum output yang dapat dihasilkan dari pemakaian sejumlah input dengan menggunakan teknologi tertentu. Secara matematika fungsi produksi dapat dituliskan sebagai berikut:

$$Q = F(K, L, X, E)$$

Dimana:

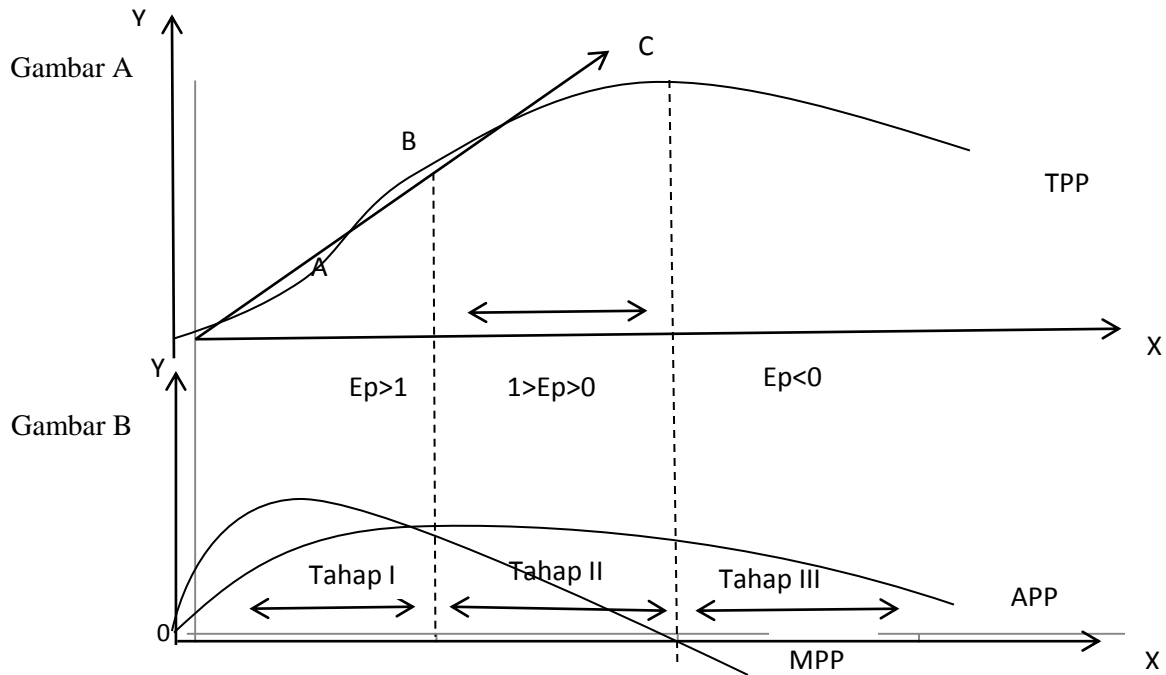
Q = Output

K; L; X; E = Input (kapital, tenaga kerja, bahan baku, keahlian keusahawan)

Dalam teori ekonomi, terdapat salah satu asumsi dasar mengenai sifat dari fungsi produksi yaitu "The Law of Deminishing Return". Teori ini mengatakan bila satu-satuan input ditambah penggunaannya sedangkan input lain tetap, maka tambahan output yang dihasilkan dari tambahan satu unit input yang semula

meningkat kemudian seterusnya menurun bila input terus ditambah (Dewi dkk, 2012).

Kurva yang menunjukkan hasil rata-rata per unit input variabel pada berbagai tingkat penggunaan input disebut Average Physical Product.



Gambar 2.1 Hubungan Antara Kurva TPP, MPP, APP dan Daerah-daerah Elastisitas Produksi

Keterangan :

1. Kurva TPP (Total Physical Product) adalah kurva yang menunjukkan tingkat produksi total pada berbagai tingkat penggunaan input variabel (input-input lain yang dianggap tetap).

2. Kurva MPP (Marginal Physical Product) adalah kurva yang menunjukkan tambahan (kenaikan) dari TPP, yaitu ΔTPP atau ΔY yang disebabkan oleh penggunaan tambahan satu unit input variabel.
3. Kurva APP (Average Physical Product) adalah kurva yang menunjukkan hasil rata-rata per unit variabel pada berbagai tingkat penggunaan input.

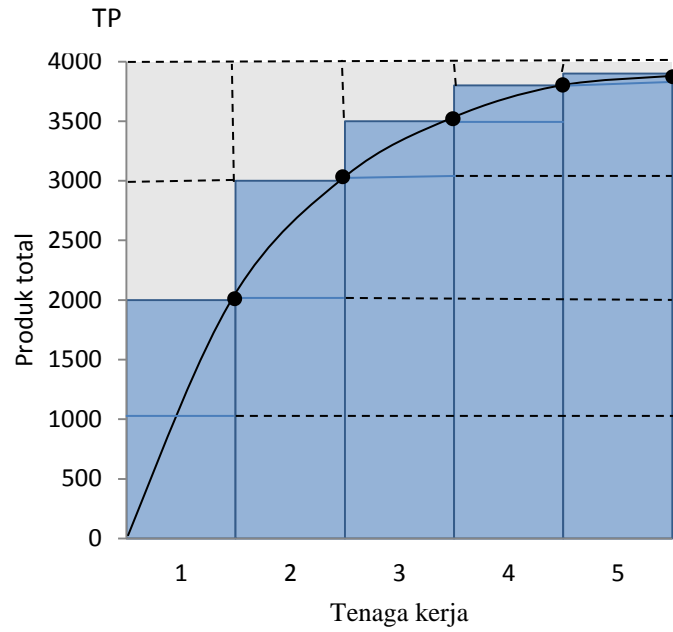
Hubungan antara jumlah input yang diperlukan dan jumlah output yang dapat dihasilkan disebut “fungsi produksi”.

Fungsi produksi merupakan hubungan antara jumlah output maksimum yang bisa diproduksi dan input yang diperlukan guna menghasilkan output tersebut, dengan tingkat pengetahuan teknik tertentu.

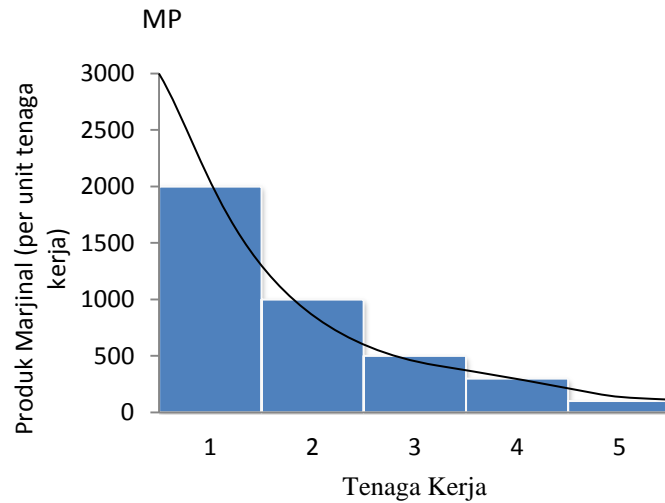
Bermula dari sebuah fungsi produksi perusahaan, kita dapat menghitung tiga konsep produksi yang penting, yaitu:

1. Produk total yang menunjukkan total output yang diproduksi dalam unit fisik.
2. Produk marjinal (marginal product) dari suatu input adalah tambahan produk atau output yang diakibatkan oleh tambahan satu unit input tersebut, dengan menganggap input lainnya konstan.
3. Produk rata-rata (average product) yaitu output total dibagi dengan unit total input.

(a) Produk Total



(b) Produk Marjinal



Gambar 2.2 Produk marjinal berasal dari produk total

Diagram (a) menunjukkan produk total meningkat dengan tambahan yang semakin kecil ketika semakin banyak unit input yang ditambah.

Diagram (b) menunjukkan produk marginal yang makin berkurang. Daerah (b) yang berada di bawah kurva produk marginal (atau persegi berwarna biru) meningkat hingga produk total yang ditunjukkan pada (a).

Menurut “hukum hasil lebih yang makin berkurang” (law of diminishing returns), produk marginal setiap unit input akan menurun sebanyak penambahan jumlah input yang bersangkutan, dengan asumsi semua input lainnya konstan.

Gambar 2.2 menggambarkan hukum hasil lebih yang makin berkurang untuk tenaga kerja, dengan asumsi bahwa tanah dan input lainnya konstan. Apa yang berlaku pada tenaga kerja juga berlaku pada tanah dan input lainnya.

Hasil terhadap skala (Return to Scale), yaitu pengaruh peningkatan skala input terhadap kuantitas yang diproduksi. Ada tiga kasus penting yang harus dibedakan:

- Constant return to scale menunjukkan kasus bilamana perubahan semua input menyebabkan peningkatan output dengan jumlah yang sama.
- Decreasing return to scale timbul bilamana peningkatan semua input dengan jumlah yang sama menyebabkan peningkatan total output yang kurang proporsional.
- Increasing return to scale terjadi bilamana peningkatan semua input menyebabkan peningkatan output yang lebih besar.

Produksi yang efisien memerlukan waktu, sama seperti diperlukannya input konvensional tenaga kerja. Ada tiga jenis waktu yang berlainan di dalam produksi dan analisis biaya yaitu:

- Periode singkat (momentary run) yaitu periode waktu yang sangat pendek ketika tidak ada perubahan apapun dalam produksi.
- Periode jangka pendek (short run) adalah periode waktu ketika input variabel seperti bahan baku dan tenaga kerja dapat disesuaikan, tetapi kurang cukup lama untuk melakukan penyesuaian semua input. Dalam jangka pendek, faktor nonvariabel seperti mesin dan peralatan, tidak dapat sepenuhnya disesuaikan ataupun dimodifikasi.
- Periode jangka panjang (long run) adalah periode ketika semua faktor produksi, baik faktor variabel maupun nonvariabel yang digunakan oleh perusahaan bisa diubah, termasuk buruh, bahan baku, dan modal.

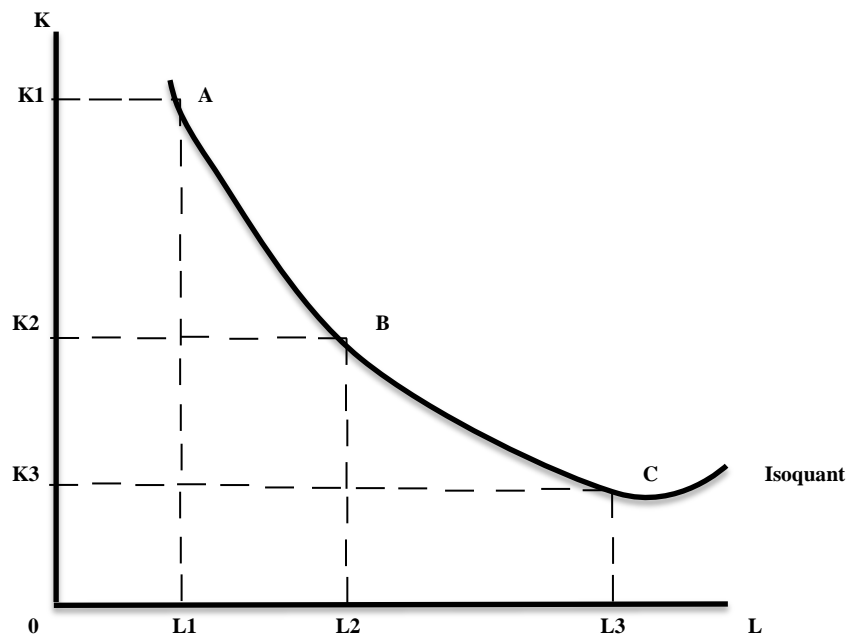
2.1.1.1 Faktor Produksi Dengan Dua Input Variabel

Jika faktor produksi yang dapat berubah adalah jumlah tenaga kerja dan jumlah modal atau sarana yang digunakan, maka fungsi produksi dapat dinyatakan $Q = f(K,L)$. Pada fungsi produksi ini diketahui, bahwa tingkat produksi dapat berubah dengan merubah faktor tenaga kerja (L) dan atau jumlah modal (K). Perusahaan mempunyai dua alternatif jika berkeinginan untuk menambah tingkat

produksinya. Perusahaan dapat meningkatkan produksi dengan menambah tenaga kerja, atau menambah modal atau menambah tenaga kerja dan modal.

a. Isoquant

Isoquant menunjukkan kombinasi dua macam input yang berbeda yang menghasilkan output yang sama. Isoquant adalah sebuah kurva yang memperlihatkan semua kemungkinan kombinasi dari input yang menghasilkan output yang sama. Isoquant produksi menunjukkan berbagai kombinasi input yang diperlukan sebuah perusahaan untuk memproduksi suatu jumlah output tertentu.



Gambar 2.3
Kurva Produksi Sama (Isoquant)

Pada fungsi produksi dengan menggunakan satu faktor produksi variabel, yaitu tenaga kerja, untuk menentukan berapa jumlah tenaga kerja yang paling optimal dalam rangka memaksimalkan profit, harus memenuhi kondisi optimalisasi, yaitu :

$$MRP_L = MRC_L$$

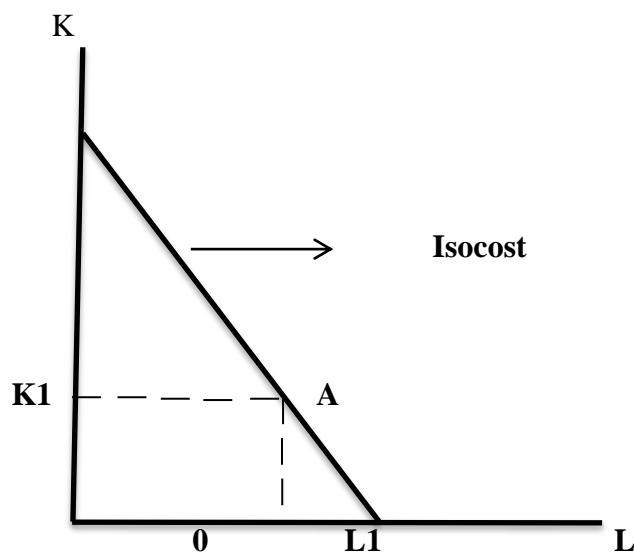
$MRP_L = (MP_L)(MR)$ = Marginal Revenue Product of Labor

$MRC_L = \frac{\Delta TC}{\Delta L}$ = Marginal Resource Cost of Labor

$MR = P$ maka $MRP_L = (MP_L) \times P$

b. Isocost

Isocost menggambarkan gabungan faktor – faktor produksi yang dapat diperoleh dengan menggunakan sejumlah biaya tertentu. Untuk membuat analisis mengenai peminimuman biaya produksi perlulah dibuat garis biaya atau isocost.



Gambar 2.4
Kurva Garis Biaya Sama (Isocost)

Jika faktor produksi yang dipergunakan adalah tenaga kerja (L) dan modal (K), maka total biaya yang harus dikeluarkan perusahaan adalah :

$$TC = r.K + w.L$$

$$r.K = TC - w.L$$

$$r = \frac{TC}{K} - \frac{w}{r}L$$

Slope dari isocost adalah : $\frac{w}{r}L$

Keterangan :

TC = Biaya Total (*Total cost*)

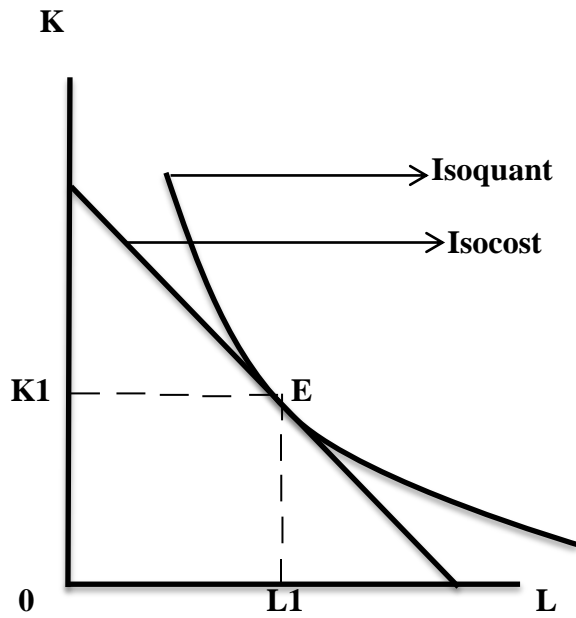
r = Harga barang modal per unit (*rent*)

w = Harga atau Upah buruh (*wages*)

c. Kondisi Produksi Optimum

Kondisi produksi optimum adalah kondisi seorang produsen dapat memilih kombinasi biaya input yang paling termurah untuk menghasilkan output. Untuk memproduksi sejumlah output tertentu, produsen bisa menggunakan berbagai kombinasi jumlah input dan dapat digambarkan dalam sebuah kurva isoquant. Berbagai kombinasi tenaga kerja dan kapital yang membebani perusahaan dengan biaya dalam jumlah yang sama dinamakan dengan isocost. Untuk meminimumkan biaya produksi sejumlah output tertentu, unit kegiatan ekonomi harus memilih kombinasi input dengan biaya minimum (*least cost combination*). Kombinasi ini

terjadi pada saat garis isocost menyinggung kurva isoquant atau sama dengan kurva keseimbangan produsen (Pindyck, 2008).



Gambar 2.5

Kurva Isocost dan Isoquant

Berdasarkan Gambar 2.5 kondisi optimal fungsi produksi dengan dua input variabel terjadi pada titik E dimana pada titik tersebut kurva isoquant bersinggungan dengan kurva isocost atau pada saat slope isoquant = slope isocost

$$MRTS = \frac{w}{r}$$

$$MP_L = \frac{\partial Q}{\partial L}$$

$$\frac{MP_L}{MP_K} = \frac{w}{r}$$

Dimana :

$$\frac{MP_L}{w} = \frac{MP_K}{r} \qquad MP_K = \frac{\partial Q}{\partial K}$$

2.1.2 Teori Pertumbuhan Harrod Domar

Teori ini dikembangkan hampir pada waktu yang bersamaan oleh Harrod (1948) di Inggris dan Domar (1957) di Amerika Serikat.

Diantara mereka menggunakan proses perhitungan yang berbeda tetapi memberikan hasil yang sama, sehingga keduanya dianggap mengemukakan ide yang sama dan disebut teori Harrod Domar. Teori ini melengkapi teori Keynes, dimana Keynes melihatnya dalam jangka panjang (kondisi dinamis). Teori Harrod Domar didasarkan pada asumsi :

1. Perekonimian bersifat tertutup
2. Hasrat menabung (MPS = 0,5) adalah konstan
3. Proses produksi memiliki koefisien yang tetap (*constant return to scale*)
4. Tingkat pertumbuhan angkatan kerja adalah konstan dan sama dengan tingkat pertumbuhan penduduk.

Model ini menerangkan dengan asumsi supaya perekonomian dapat mencapai pertumbuhan yang kuat (*steady growth*) dalam jangka panjang. Asumsi yang

dimaksud disini adalah kondisi dimana barang modal telah mencapai kapasitas penuh, tabungan memiliki proporsional yang ideal dengan tingkat pendapatan nasional, rasio antara modal dengan produksi (*capital output ratio/COR*) tetap. Perekonomian terdiri dari dua sector ($Y = C = I$).

Atas dasar asumsi – asumsi khusus tersebut, Harrod Domar membuat analisis dan menyimpulkan bahwa pertumbuhan jangka panjang yang mantap (seluruh kenaikan produksi dapat diserap oleh pasar) hanya bisa tercapai apabila terpenuhi syarat – syarat keseimbangan sebagai berikut :

$$G = K = N$$

Dimana :

G = Growth (tingkat pertumbuhan output)

K = Capital (tingkat pertumbuhan modal)

N = tingkat pertumbuhan angkatan kerja

Harrod Domar mendasarkan teorinya berdasarkan mekanisme pasar tanpa campur tangan pemerintah. Akan tetapi kesimpulannya menunjukkan bahwa pemerintah perlu merencanakan besarnya investasi agar terdapat keseimbangan dalam sisi penawaran dan sisi permintaan barang.

Harrod Domar memberikan peran penting pembentukan investasi terhadap pertumbuhan ekonomi suatu Negara. Investasi dianggap faktor penting karena

memiliki dua karakter atau dua peran sekaligus dalam mempengaruhi perekonomian, yaitu :

1. Investasi berperan sebagai faktor yang dapat menciptakan pendapatan, artinya investasi mempengaruhi sisi permintaan.
2. Investasi dapat memperbesar kapasitas produksi perekonomian dengan meningkatkan stok modal, artinya investasi akan mempengaruhi dari sisi penawaran.

Dalam perspektif waktu yang lebih panjang, pengeluaran investasi tidak hanya mampu mempengaruhi permintaan agregatif, namun juga mampu mempengaruhi penawaran agregatif, melalui perubahan kapasitas produksi. Dalam jangka panjang, faktor investasi yang dinotasikan I akan menambah stock capital seperti pabrik industry, jalan, mesin dan sebagainya. Dengan demikian investasi sama dengan perubahan stock capital atau dapat dinyatakan sebagai berikut :

$$I = \Delta K$$

Peningkatan stock capital dapat diartikan sebagai peningkatan kapasitas produksi masyarakat. Peningkatan kapasitas produksi berarti peningkatan penawaran agregatif

2.1.3 *New Growth Theory* (Pertumbuhan Ekonomi Baru)

Teori pertumbuhan Ekonomi baru, yang pada dasarnya merupakan teori pertumbuhan endogen, memberikan kerangka teoritis untuk menganalisis

pertumbuhan endogen karena menganggap pertumbuhan GNP sebagai akibat dari keseimbangan jangka panjang. Motivasi dasar dari teori pertumbuhan baru adalah menjelaskan perbedaan dari tingkat pertumbuhan yang diamati. Lebih jelasnya, pada teoritis pertumbuhan endogen mencoba untuk menjelaskan dan dianggap ditentukan secara eksogen oleh persamaan pertumbuhan neoklasik versi Solow (Solow residual).

Perbedaan antara model pertumbuhan endogen dengan model neo klasik adalah mengasumsikan bahwa investasi pemerintah dan swasta data *human capital* menghasilkan penghematan eksternal dan peningkatan produktivitas yang menolak kecenderungan *diminishing return* (Faizatun Nur Fadila, 2015). Teori pertumbuhan endogen mencoba menjelaskan adanya skala hasil yang meningkatkan (*Increasing return to scale*) dan pola pertumbuhan jangka panjang antarnegara. Persamaan teori endogen dapat dituliskan dengan formulasi:

$$Y = AK$$

Dimana :

A = Faktor yang mempengaruhi teknologi

K = Modal fisik dan modal manusia

Perlu diperhatikan bahwa tidak ada hasil yang menurun (*diminishing return*) atas *capital* dalam formulasi tersebut. Kemungkinan yang bisa terjadi adalah investasi dalam modal manusia dan fisik dapat menghasilkan penghematan eksternal dan peningkatan produktivitas yang lebih menghasilkan yang cukup untuk menutup *diminishing returns*, lebih lanjut hal tersebut menyebabkan dihilangkannya a dari

persamaan solow, sehingga persamaan pertumbuhan neoklasik $Y = Ae^{mt} K^a L^{1-a}$ menjadi $Y = Ae^{mt} K$ dalam persamaan pertumbuhan endogen.

Implikasi dari penekanan terhadap pentingnya tabungan dan investasi pada modal manusia oleh teori pertumbuhan baru adalah tidak ada kekuatan yang menyamakan tingkat pertumbuhan antarnegara, serta tingkat pertumbuhan nasional yang konstan dan berbeda antarnegara tergantung pada besarnya tabungan nasional dan tingkat teknologi. Konsekuensinya, bagi negara yang miskin modal manusia dan fisik sulit untuk menyamai tingkat pendapatan perkapita negara yang kaya *capital*, walaupun memiliki tingkat tabungan nasional yang sama besar.

Aspek yang paling menarik dari model pertumbuhan endogen adalah bahwa model ini membantu dalam menjelaskan fenomena anomali aliran *capital* antara negara (dari negara miskin ke kaya) menyebabkan disparitas yang sangat besar antara negara dunia pertama, dengan negara dunia ketiga. Model pertumbuhan endogen menerangkan peran aktif kebijakan publik dalam meningkatkan pembangunan ekonomi melalui investasi langsung maupun tidak langsung dalam *human capital* dan mendorong investasi asing dalam industri padat pengetahuan seperti perangkat lunak komputer dan telekomunikasi.

Model teoritis peran *human capital* dan teknologi sebagai pemacu pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas dapat ditelusuri mulai dari model Solow (Romer, 1996). Pemikiran Robert M Solow sejak 1956 telah memasukan unsur *human capital* dan teknologi sebagai faktor penentu pertumbuhan ekonomi.

Sumbangan pemikiran Solow ini kemudian dikembangkan oleh Romer dan telah membawa revolusi besar dalam teori pertumbuhan ekonomi yang kini sering dikenal dengan “*The New Growth Theory*”.

2.1.4 Teori *Human Capital*

Investasi dalam pelatihan dan peningkatan sumber daya manusia merupakan investasi yang amat penting (Becker, 1964 dalam Pratiwi 2005) karena pengalaman, *skill* dan pengetahuan yang dimiliki sumber daya manusia mempunyai nilai ekonomi bagi perusahaan yang menciptakan produktivitas dan kemampuan beradaptasi. Peningkatan produktivitas dari setiap pegawai atau *human capital* memerlukan biaya investasi pada *human capital* yang berkaitan dengan pemotivasian, pengawasan dan mempertahankan pegawai dalam mengantisipasi *return* di masa mendatang (Flamholtz & Lacey, 1981).

Ada kelebihan dari teori atau human capital dibandingkan dengan model – model sebelumnya antara lain, model ini telah memperhatikan sumberdaya manusia sebagai sumber pertumbuhan ekonomi suatu Negara. Dengan kata lain bahwa sumber pertumbuhan ekonomi bukan hanya ditentukan oleh akumulasi modal atau pertumbuhan teknologi, tetapi juga dipengaruhi oleh akumulasi pengetahuan dan akumulasi human capital.

2.1.5 Peran Pemerintah dalam Perekonomian

Peran Pemerintah dalam perekonomian terbagi menjadi :

1. Peran Alokatif

Yaitu peranan pemerintah dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi yang ada agar pemanfaatannya bisa optimal dan mendukung efisiensi produksi.

2. Peran Distributif

Yaitu peranan pemerintah dalam mendistribusikan sumber daya, kesempatan dan hasil – hasil ekonomi secara adil dan wajar.

3. Peran Stabilitatif

Yaitu peranan pemerintah dalam memelihara stabilitas perekonomian dan memulihkannya jika berada dalam keadaan disequilibrium.

4. Peran Dinamisatif

Yaitu peranan pemerintah dalam menggerakkan proses pembangunan ekonomi agar lebih cepat tumbuh, berkembang dan maju.

2.1.6 Pengertian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

UMKM adalah singkatan dari Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. UMKM merupakan sektor usaha yang terdiri dari mikro kecil dan menengah. Usaha-usaha ini menjadi sentra perekonomian rakyat khususnya rakyat menengah ke bawah.

Secara umum dapat kita katakan bahwa usaha kecil adalah perusahaan kecil yang melakukan usaha seperti di bidang perdagangan eceran berupa toko, kedai, kios, warung atau di bidang industri kecil atau industri rumah tangga seperti usaha kerajinan, usaha pengolahan atau produksi makanan dan minuman maupun usaha jasa seperti penjahit pakaian, pertukangan, transportasi darat dan sebagainya.

Usaha Mikro Kecil adalah usaha yang komoditasnya tidak gampang berubah dengan lokasi yang tidak berpindah-pindah dengan cara mengelola sendiri dan menggunakan Sumber Daya Manusia yang memiliki pengalaman kewirausahaan. Walaupun demikian, usaha ini sudah memiliki administrasi keuangan dan sebagian usaha telah memiliki izin usaha.

Ada beberapa pengertian UMKM menurut para ahli atau pihak yang langsung berhubungan dengan UMKM, antara lain:

1. Menurut Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM):

Pengertian UMKM :

- a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang – Undang.
- b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang

bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang ini.

- c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang – Undang ini.

2. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS)

Lembaga pemerintah seperti Departemen Perindustrian dan Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan jumlah pekerja sebagai ukuran untuk membedakan skala usaha antara UMKM dan Usaha Besar, sebagaimana disajikan berdasarkan tabel berikut :

Tabel 2.1 Kriteria UMKM menurut Badan Pusat Statistik

No	Unit Usaha	Jumlah Pekerja Tetap
1	Usaha Mikro	Hingga 4 orang
2	Usaha Kecil	5 hingga 19 orang
3	Usaha Menengah	20 hingga 99 orang
4	Usaha Besar	Lebih dari 99 orang

Sumber : Badan Pusat Statistik

3. Bank Indonesia (BI)

Bank Indonesian sebagai Bank Sentral tetap mengacu terhadap Undang – Undang Republik Indonesia nomor 20 Tahun 2008. Tetapi UMKM adalah perusahaan industri dengan karakteristik berupa :

- a. Modalnya kurang dari Rp. 20 juta
- b. Untuk satu putaran dari usahanya hanya membutuhkan dana Rp. 5 juta
- c. Memiliki aset maksimum Rp. 600 juta di luar tanah dan bangunan.
- d. Omzet tahunan \leq Rp. 1 miliar.

2.1.7 Kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Menurut Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2008 UMKM memiliki kriteria sebagai berikut :

1. Usaha Mikro, yaitu usaha produktif milik orang perseorangan atau badan usaha milik perorangan yang memenuhi kriteria yakni :
 - a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah)
2. Usaha Kecil, yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria yakni :
 - a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. Memiliki penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000 (Dua Miliar Lima Ratus Juta Rupiah).
3. Usaha Menengah, yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan

merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria :

- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000 (Sepuluh Miliar Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000 (Dua Miliar Lima Ratus Juta Rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000 (Lima Puluh Miliar Rupiah)

Selanjutnya dalam pasal 6 disebutkan bahwa usaha yang digolongkan sebagai UMKM memiliki kriteria sebagaimana disajikan dalam table berikut ini :

Tabel 2.2 Kriteria UMKM Menurut UU No 20 Tahun 2008

No.	Uraian	Kriteria	
		Asset	Omzet
1	Usaha Mikro	Maks. 50 Juta	Maks. 300 Juta
2	Usaha Kecil	> 50 Juta - 500 Juta	> 300 Juta - 2,5 Miliar
3	Usaha Menengah	> 500 Juta - 10 Miliar	> 2,5 Miliar - 50 Miliar

Sumber : Undang – Undang Republik Indonesia nomor 20 Tahun 2008

2.1.8 Karakteristik Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah memiliki karakteristik tersendiri yang dapat membedakan antara UMKM dengan usaha berskala besar. Karakteristik yang membedakan UMKM ini dengan usaha berskala besar adalah dari segi permodalannya dan Sumber Daya Manusiannya. Usaha Mikro Kecil dan Menengah umumnya memerlukan modal yang relatif kecil dibandingkan dengan usaha berskala besar. Oleh karena itu UMKM lebih banyak bergerak di sektor informal, karena keterbatasan sumber daya yang dimiliki terutama masalah modal. Dalam perspektif perkembangannya, UMKM dapat diklasifikasikan menjadi 4 (Empat) kelompok yaitu :

1. *Livelihood Activities*, merupakan UMKM yang digunakan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah, yang lebih umum dikenal dengan sebagai sektor informal. Contohnya adalah pedagang kaki lima.
2. *Micro Enterprise*, merupakan UMKM yang memiliki sifat pengrajin tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan.
3. *Small Dynamic Enterprise*, merupakan UMKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor.

4. *Fast Moving Enterprise*, merupakan UMKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi Usaha Besar (UB).

2.1.9 Ciri – ciri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

1. Bahan baku mudah diperoleh.
2. Menggunakan teknologi sederhana sehingga mudah dilakukan.
3. Keterampilan dasar umumnya sudah dimiliki secara turun temurun.
4. Bersifat padat karya atau menyerap tenaga kerja yang cukup banyak.
5. Peluang pasar cukup luas, sebagian besar produknya terserap di pasar lokal / domestik dan tidak tertutup sebagian lainnya berpotensi untuk diekspor.
6. Beberapa komoditas tertentu memiliki ciri khas terkait dengan karya seni budaya daerah setempat.
7. Melibatkan masyarakat ekonomi lemah setempat secara ekonomis menguntungkan.

2.1.10 Peran dan Fungsi Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan secara terstruktur dengan arah produktivitas dan daya saing adalah tujuan dan peran UMKM dalam menumbuhkan wirausahawan yang tangguh. Secara umum UMKM dalam perekonomian nasional memiliki peran :

1. Sebagai pemeran utama dalam kegiatan ekonomi.
2. Penyedia lapangan kerja.
3. Pemain penting dalam pengembangan perekonomian lokal dan pemberdayaan masyarakat.
4. Pencipta pasar baru dan sumber inovasi, serta kontribusinya terhadap neraca pembayaran (Departemen Koperasi dan UKM, 2008).

2.1.11 Permasalahan UMKM

Menurut Mohammad Jafar Hafisah permasalahan yang dihadapi UMKM bisa dilihat dari faktor internal dan faktor eksternal :

1. Faktor Internal
 - a. Kurangnya Permodalan
 - b. Sumber Daya Manusia (SDM) yang terbatas
 - c. Lemahnya Jaringan Usaha dan Kemampuan Penetrasi Pasar
2. Faktor Eksternal
 - a. Iklim Usaha belum sepenuhnya Kondusif
 - b. Terbatasnya Sarana dan Prasarana Usaha
 - c. Implikasi Otonomi Daerah
 - d. Implikasi Perdagangan Bebas
 - e. Sifat produk dengan *Lifetime* Pendek
 - f. Terbatasnya Akses Pasar.

2.2 Program Wirausahaan Bank Indonesia (WUBI)

2.2.1 Wirausaha Bank Indonesia

WUBI (Wirausaha Bank Indonesia) 2016, yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian, skill dan akses pasar, yang dapat dilakukan melalui kegiatan keikutsertaan WUBI dalam berbagai pameran atau pemberian pelatihan

Untuk pengembangan tersebut Bank Indonesia memberikan Bantuan teknis berupa pelatihan diantaranya :

1. Pelatihan *Good Manufacturing Practices* dan *Hazard Analysis Critical Control Point* (HACCP).
2. Pelatihan Manajemen Keuangan dan Perpajakan
3. Pelatihan Akuntansi dan Akses Permodalan, dan
4. Pelatihan Pengawetan Pangan.

Kapasitas pertumbuhan ekonomi nasional pun ditentukan jumlah wirausaha atau entrepreneur. Sangat disayangkan karena jumlah wirausaha di Indonesia kini masih di sekitar angka 1,56 % penduduk.

Bilangan tersebut sangat minim dibanding negara tetangga, seperti Malaysia, Thailand dan Singapura, yang sudah di atas 5 %. Sedangkan Jepang dan Amerika Serikat memiliki pengusaha sebanyak lebih 10 % penduduknya.

Dalam upaya mengembangkan kinerja kalangan muda wirausaha muda, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat menggelar program

Wirausaha Bank Indonesia (WUBI) . Kiprah ini bagian usaha pengembangan sektor riil, yang sangat menentukan perputaran dan pertumbuhan ekonomi bangsa.

Dinamai Wirausaha Bank Indonesia (WUBI), program ini dimulai pada 2014. Sebanyak 20 orang pelaku UMKM di Jawa Barat mengikuti program gelombang pertama. Metode penggemblengan berupa pendampingan penuh dan komprehensif.

Sesuai latar belakang usaha para peserta, materi pelatihan mengenai Regulasi dan Keamanan Pangan, *Good Manufacturing Practices* (GMP), dan *Hazard Analysis Critical Control Point* (HACCP) Pelatihan di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat.

- a. Pelatihan *Good Manufacturing Practices* (GMP) dan *Hazard Analysis Critical Control Point* (HACCP).

GMP merupakan suatu pedoman bagi industri pangan, untuk memproduksi makanan dan minuman yang baik. GMP menurut keputusan Menteri Kesehatan Nomor 23/MenKes/SK/1978 meliputi: lokasi dan lingkungan pabrik, bangunan, mutu produk akhir, peralatan produksi, bahan baku, higiene karyawan, fasilitas sanitasi, pelabelan, wadah kemasan, penyimpanan, pemeliharaan dan program sanitasi, serta laboratorium dan pemeriksaan.

Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) adalah suatu sistem kontrol dalam upaya pencegahan terjadinya masalah yang didasarkan atas identifikasi titik-titik kritis di dalam tahap penanganan dan proses produksi.

HACCP merupakan salah satu bentuk manajemen resiko yang dikembangkan untuk menjamin keamanan pangan dengan pendekatan pencegahan (preventive) yang dianggap dapat memberikan jaminan dalam menghasilkan makanan yang aman bagi konsumen.

Tujuan dari penerapan HACCP dalam suatu industri pangan adalah untuk mencegah terjadinya bahaya sehingga dapat dipakai sebagai jaminan mutu pangan guna memenuhi tuntutan konsumen. HACCP bersifat sebagai sistem pengendalian mutu sejak bahan baku dipersiapkan sampai produk akhir diproduksi, masal dan didistribusikan. Oleh karena itu dengan diterapkannya sistem HACCP akan mencegah resiko komplain karena adanya bahaya pada suatu produk pangan. Selain itu, HACCP juga dapat berfungsi sebagai promosi perdagangan di era pasar global yang memiliki daya saing kompetitif.

b. Pelatihan Manajemen Keuangan dan Perpajakan

Menurut Martono dan Agus Harjito (2007:4) menyebutkan bahwa :
“Manajemen Keuangan atau dalam literature lain disebut pembelanjaan adalah sebagai aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan bagaimana memperoleh dana, menggunakan dana mengelola assets sesuai dengan tujuan perusahaan secara menyeluruh.

c. Pelatihan Akuntansi dan Akses Permodalan

Pelatihan Akuntansi dan Akses Permodalan bertujuan untuk meningkatkan sustainabilitas pembiayaan UMKM dan untuk mencatat transaksi keuangan sederhana dan membuat laporan keuangan bagi usaha perorangan (Usaha Mikro) maupun usaha kecil pada sektor jasa, perdagangan, pertanian maupun manufaktur. Akses Permodalan bertujuan untuk memudahkan bagaimana para peserta UMKM binaan Bank Indonesia untuk mendapatkan modal , maka dari itu Bank Indonesia membuat dan mengarahkan untuk segera mendownload aplikasi APIK.

d. Pelatihan Pengawetan Pangan

Pelatihan ini bertujuan untuk membuat makanan memiliki daya simpan yang lama dan mempertahankan sifat-sifat fisik dan kimia makanan.

Dalam mengawetkan makanan harus diperhatikan jenis bahan makanan yang diawetkan, keadaan bahan makanan, cara pengawetan, dan daya tarik produk pengawetan makanan. Teknologi pengawetan makanan yang dikembangkan dalam skala industri masa kini berbasis pada cara-cara tradisional yang dikembangkan untuk memperpanjang masa konsumsi bahan makanan.

2.2.2 Tujuan Wirausaha Bank Indonesia

1. Meningkatkan jumlah Wirausaha di sektor Komoditas/Produk/Jenis Usaha (KPJU) Unggulan UMKM di Provinsi Jawa Barat.

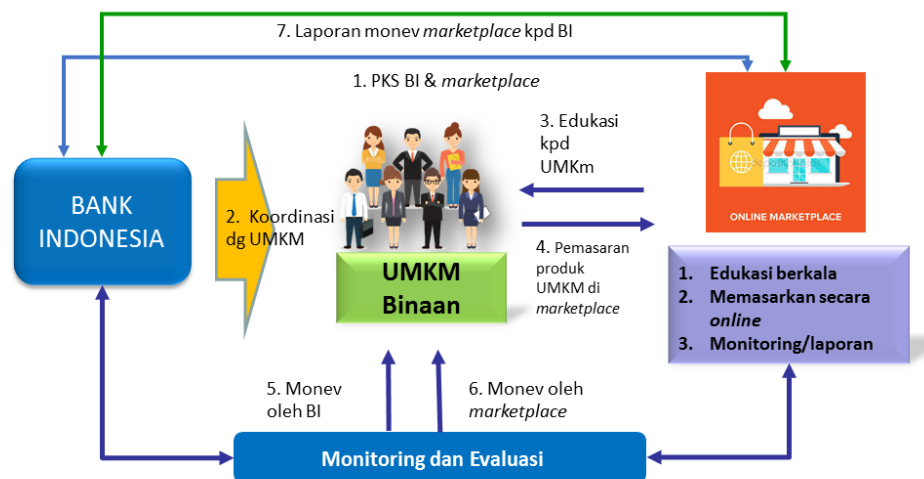
2. Untuk memberikan pengetahuan dan meningkatkan pemahaman kepada kelompok dan anggota (individu) mengenai pentingnya perencanaan keuangan, serta :
3. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan perencanaan keuangan , meliputi :
 - a. Menghitung Harga Pokok Produk
 - b. Menetapkan harga jual, menghitung margin dan Break Event Point ;
 - c. Menyusun Rencana Arus kas dalam satu periode tertentu
4. Mencari alternatif untuk memperluas jangkauan pemasaran bagi produk UMKM .
5. Meningkatkan kemandirian, skill dan akses pasar, yang dapat dilakukan melalui kegiatan keikutsertaan WUBI dalam berbagai pameran atau pemberian pelatihan.

Bantuan ini diberikan tidak lain adalah agar UMKM binaan KPwBI Jawa Barat dapat memiliki akses keuangan terhadap perbankan (bankable). Upaya-upaya di atas dilakukan mengingat tantangan yang dihadapi oleh UMKM di Indonesia cukup banyak diantaranya terbatasnya akses pembiayaan yang disebabkan karena keterbatasan kemampuan dalam penyusunan keuangan, dan terbatasnya akses pasar dikarenakan pasar UMKM saat ini hanya mencakup pasar domestik. Tantangan ini

pun tidak hanya dialami oleh UMKM di Indonesia, namun dirasakan pula oleh UMKM di negara Asia lainnya.

2.2.3 Konsep Program Wirausaha Bank Indonesia

Dilatar belakangi oleh Peraturan Bank Indonesia No.14/22/PBI/2012 tanggal 21 Desember 2012 sebagai mana telah diubah pada peraturan No. 17/12/PBI/2015 tanggal 25 Juni 2015 merupakan acuan dalam pengembangan UMKM melalui kewajiban perbankan untuk memenuhi rasio kredit UMKM, dan pemberian bantuan teknis. dan kurangnya pemahaman perbankan mengenai profil bisnis UMKM maka Bank Indonesia pusat membuat konsep Wirausaha Bank Indonesia sebagai berikut :



Gambar 2.6 Pilot Project Pemasaran Produk UMKM

Sumber : Bank Indonesia, Tw III 2017

Dari gambar 2.6 menjelaskan tentang alur bagaimana Bank Indonesia memberikan Program Wirausaha Bank Indonesia kepada para peserta UMKM

penerima Wirausaha Bank Indonesia. Selain memberikan edukasi tentang pemasaran secara online dan pelatihan, Bank Indonesia juga melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.

2.2.4 Strategi Pengembangan Wirausaha Bank Indonesia

Salah satu pilar kerangka kebijakan pengembangan UMKM Bank Indonesia adalah untuk meningkatkan sustainabilitas pembiayaan UMKM. Perwujudan terhadap pilar tersebut kemudian dilaksanakan oleh Bank Indonesia melalui 3 aspek utama yaitu infrastruktur jangka pendek (2017), jangka menengah (2018) , jangka menengah (2019) dan jangka panjang (2020-2021).

Melalui aspek infrastruktur, Bank Indonesia tengah mempersiapkan Aplikasi Pencatatan Informasi Keuangan (APIK) yang akan segera diluncurkan secara nasional pada bulan November 2017. Aplikasi APIK ini merupakan aplikasi akuntansi yang digunakan untuk mencatat transaksi keuangan sederhana dan membuat laporan keuangan bagi usaha perorangan (usaha mikro) maupun usaha kecil pada sektor jasa, perdagangan, pertanian maupun manufaktur. Aplikasi APIK ini didesain sedemikian rupa dengan menggunakan smartphone berbasis android yang dapat diunduh secara mudah melalui Google Playstore . Dalam rangka mensosialisasikan penggunaan APIK ini, KPwBI Jawa Barat merencanakan untuk memberikan pelatihan terkait aplikasi dimaksud pada akhir tahun 2017 kepada

seluruh Wirausaha Binaan KPwBI Jawa Barat sebagai tindak lanjut dari tahapan inkubasi dalam rangka pencetakan Wirausaha binaan Bank Indonesia yang memiliki daya saing tinggi.

Selain melalui infrastruktur APIK, proses sustainabilitas pembiayaan UMKM pun didukung oleh survei perolehan data laporan keuangan UMKM. Dalam aspek kapasitas, Bank Indonesia mengharapkan dukungan perbankan agar rasio kredit UMKM mencapai target yang telah ditentukan. Oleh karenanya dalam peningkatan sustainabilitas pembiayaan keuangan ini target dari Bank Indonesia mencakup 2 (dua) pihak penting yang saling berkaitan yaitu pihak perbankan dan pihak UMKM sendiri. Sebagaimana gambar berikut dijelaskan bagaimana keterkaitan dapat berjalan.



Sumber : Bank Indonesia,2017

Gambar 2.7 Peningkatan Sustainabilitas Pembiayaan UMKM dengan target Perbankan dan UMKM

Dari gambar 2.7, dapat dijelaskan bahwa dengan meningkatnya manajemen keuangan UMKM melalui SI APIK, maka dapat mempermudah akses UMKM terhadap perbankan begitu pula sebaliknya. Bilamana pegawai (account officer) bank memiliki keterampilan analisa yang baik yang didukung oleh peraturan bagi perbankan dalam peningkatan porsi kredit kepada UMKM maka proses pembiayaan UMKM dapat berjalan sesuai dengan target yang telah ditentukan.

2.3 Penelitian Terdahulu

Untuk memperkaya perspektif penelitian ini, maka selain menelaah kajian teori yang telah dijelaskan sebelumnya dilakukan juga *review* terhadap beberapa penelitian terdahulu. Berikut beberapa penelitian yang sudah pernah dilakukan terkait dengan pengembangan UMKM :

Tabel 2.3 Penelitian Terdahulu

No.	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Metode Analisis	Kesimpulan
1.	Pengaruh Pelatihan dan Pembinaan Terhadap Pengembangan Usaha Kecil pada Program Kemitraan Bina Lingkungan (Raden Rudi,2013)	Untuk mengetahui apakah pelatihan dan pembinaan secara bersamaan mempengaruhi pengembangan Usaha Kecil.	Dalam penelitian ini menggunakan pengujian analisis regresi berganda	Hasil penelitian memberikan penjelasan bahwa secara serentak atau simultan maupun secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap perkembangan usaha kecil mitra binaan CDC

No.	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Metode Analisis	Kesimpulan
2.	Pengaruh Pelatihan, Pendampingan dan Pembinaan Pemerintah Kota Yogyakarta Terhadap Pendapatan UMKM (Meida Nur Rahma, 2018)	Untuk menjelaskan pengaruh pelatihan dan pendampingan pemerintah Kota Yogyakarta terhadap pendapatan UMKM	Dalam penelitian ini menggunakan pengujian analisis regresi berganda.	Berdasarkan hasil pengujian hipotesis I menunjukkan bahwa secara parsial variabel pelatihan dan pendampingan dari Pemerintah Kota Yogyakarta memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Pendapatan UMKM
3.	Fasilitas Peranan Sarana dan Prasarana Terhadap Produktivitas Kerja UKM di Kota Magelang (Harsono, 2012)	Untuk mengetahui Peranan Sarana dan Sarana Terhadap Produktivitas UKM di Kota Magelang	Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan program SPSS 16	Bantuan pembangunan prasarana, Komponen penting pemberdayaan UKM adalah pembangunan prasarana produksi dan pemasaran. Tersedianya prasarana pemasaran dan atau transportasi dari lokasi produksi ke pasar, akan mengurangi rantai pemasaran dan akan meningkatkan penerimaan pengusaha kecil, dan pengusaha menengah.

Dari tabel penelitian terlebih dahulu di atas menjelaskan bahwa bantuan pelatihan terhadap kinerja UMKM sangat mempengaruhi. Maka, penulis ingin

meneliti bantuan pelatihan program Wirausaha Bank Indonesia terhadap hasil produksi UMKM binaan Bank Indonesia di Kota Bandung. Yang membedakan peneliti dengan yang lainnya adalah bahwa pelatihan ini di berikan oleh Bank Indonesia.

2.4 Kerangka Pemikiran

Pengembangan Wirausaha Bank Indonesia (WUBI) bertujuan untuk meningkatkan kemampuan wirausaha yang di bina Bank Indonesia dalam mengoptimalkan segala sumber daya yang ada, baik itu materil, intelektual, waktu, dan kemampuan kretivitasnya untuk menghasilkan suatu produk atau usaha yang berguna bagi dirinya dan bagi orang lain dan mencetak wirausaha tangguh.

Peraturan Bank Indonesia no.17/12/PBI/2015 tentang pengembangan UMKM melalui kewajiban perbankan untuk memenuhi rasio kredit UMKM dan pemberi bantuan teknis.

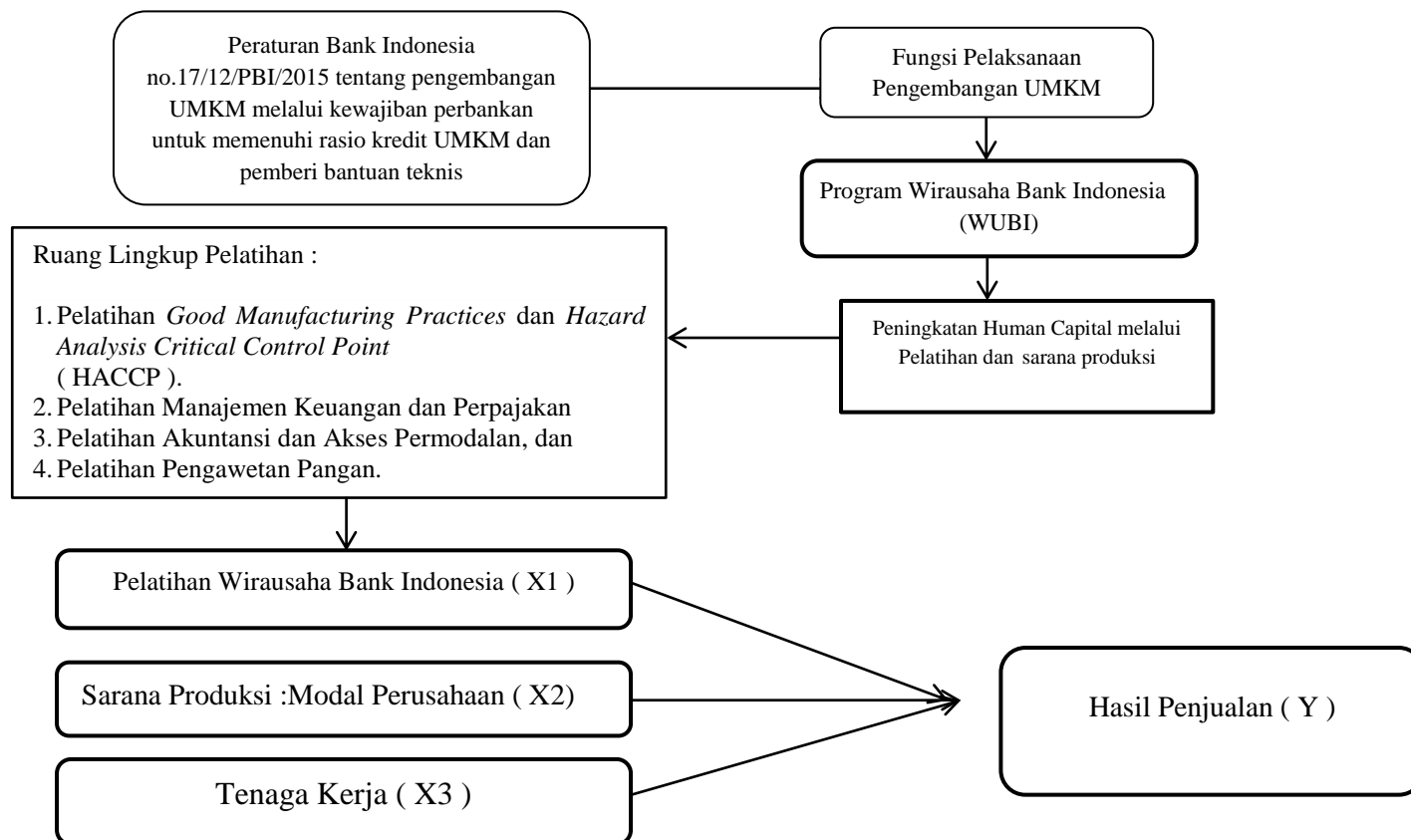
Melalui Pengembangan Program Wirausaha Bank Indonesia yang di keluarkan oleh Fungsi Pelaksanaan Pengembangan UMKM merupakan upaya untuk meningkatkan sektor riil dan UMKM di Jawa Barat khusus nya di Kota Bandung. Potensi Usaha , Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Bandung sangat baik. Banyaknya jumlah penduduk serta tingginya kreativitas warga ini menjadikan Kota

Bandung sebagai gudangnya para kreator di Tanah Air. Peningkatan Human Capital melalui pelatihan dan sarana produksi kepada para pelaku UMKM atau tenaga kerja.

Pelatihan – pelatihan yang diberikan oleh Bank Indonesia diantaranya pelatihan GMP, HACCP, manajemen keuangan, akses permodalan dan pengawetan pangan. Maka, Pelatihan WUBI, Sarana Produksi dan Tenaga Kerja maka akan mempengaruhi Hasil Penjualan / Produksi.

Oleh karena itu, jika kapital (barang modal) yang berasal dari perusahaan itu sendiri dan tenaga kerja yang berkualitas maka akan mempengaruhi terhadap hasil penjualan.

Salah satu indikator untuk mengetahui bagaimana perkembangan UMKM di Kota Bandung yaitu melihat dari hasil produksi atau penjualan. Berikut adalah gambar kerangka pemikiran:



Gambar 2.8 Kerangka Pemikiran

2.5 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pelatihan Wirausaha Bank Indonesia diduga berpengaruh positif terhadap hasil penjualan.
2. Sarana produksi diduga berpengaruh positif terhadap hasil penjualan.
3. Tenaga kerja diduga berpengaruh positif terhadap hasil penjualan.